

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Partisipatif yang ada di Desa Kedungwaru terdiri dari berbagai macam lembaga formal khususnya, yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Lembaga Kemasyarakatan berada dalam setiap masyarakat mempunyai taraf kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pokok apabila dikelompokkan merupakan himpunan pokok dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip kesukarelaan, kemandirian, dan keragaman. Sedangkan karakteristik dari Lembaga Kemasyarakatan berbasis kewilayahan, keagamaan, profesi, kebudayaan yang termasuk di dalamnya adat istiadat, kepemudaan, gender, dan interest grub/kepentingan.

Hasil identifikasi terdapat 5 lembaga, lembaga sosial kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada di Desa Kedungwaru lembaga tersebut meliputi LPMD, PKK, RT, RW, Karang Taruna.<sup>76</sup>

Hasil pemetaan lembaga yang dilakukan pada waktu proses pengkajian potensi dan masalah menunjukkan lembaga kemasyarakatan yang eksis dan memiliki pengaruh langsung dalam menggerakkan masyarakat adalah

---

<sup>76</sup> Observasi tanggal 22 November 2019, pukul 08.25 WIB

LPMD, RT, RW, PKK, dan Karang Taruna. Dalam pelaksanaannya, LPMD yang mewadahi pelaksanaan pembangunan di Desa dari usulan RT/RW serta berwenang mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut. Fungsi lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dilaksanakan dengan:

a. Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif

Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melalui musyawarah setiap akan memulai kegiatan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pembangunan dan tujuan dilaksanakannya pembangunan. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung mengungkapkan bahwa:

saya sebagai kepala desa menerangkan bahwa lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa. Memiliki tugas pokok dan fungsi serta memiliki arah pembangunan yang berbeda-beda, membantu pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan. Namun tetap diadakan musyawarah terlebih dahulu setiap akan dimulai kegiatan. Pengurus lembaga kemasyarakatan desa harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pembangunan dan tujuan dilaksanakannya pembangunan. Selain pembangunan, yang tak kalah penting juga fungsi lembaga kemasyarakatan dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan di Desa.<sup>77</sup>

Data tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Yudo

Winulyo yang mengungkapkan bahwa:

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan bapak Mohammad Toha, Kepala Desa, tanggal 22 November 2019, pukul 08.00 WIB

sebagai sekretaris desa menerangkan bahwa lembaga kemasyarakatan desa dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat desa. Memiliki tugas dan fungsi serta memiliki arah pembangunan yang berbeda-beda, dan membantu pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan. Namun tetap diadakan musyawarah terlebih dahulu setiap akan dimulai kegiatan. Pengurus lembaga kemasyarakatan desa harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pembangunan dan tujuan dilaksanakannya pembangunan.<sup>78</sup>

Hasil wawancara dengan Slamet Marjuki yang mengungkapkan bahwa:

pembagian kinerja untuk lembaga kemasyarakatan desa sudah terbagi masing-masing, sehingga kami tinggal bertugas sesuai fungsi yang sudah ditentukan oleh kepala desa dan membantu pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan. Namun tetap diadakan musyawarah terlebih dahulu setiap akan dimulai kegiatan. Pengurus lembaga kemasyarakatan desa harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pembangunan dan tujuan dilaksanakannya pembangunan.<sup>79</sup>

Hasil wawancara dengan Heru yang mengungkapkan bahwa:

sebagai Ketua LPM kepala desa telah membagi kerja untuk LKM khususnya LPM yang berperan penting dalam pembangunan, sehingga kami tinggal bertugas sesuai yang telah ditentukan oleh kepala desa dan membantu pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan. Hal ini karena pekerjaan dibagi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Namun tetap diadakan musyawarah terlebih dahulu setiap akan dimulai kegiatan. Pengurus lembaga kemasyarakatan desa harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pembangunan dan tujuan dilaksanakannya pembangunan.<sup>80</sup>

Hasil wawancara dengan Suyoto yang mengungkapkan bahwa:

Pembagian kerja dalam LKM sudah dibagi, sehingga kami bertugas sesuai dengan tugas masing-masing dalam membantu pemerintah desa dalam perencanaan

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan bapak Yudo Winulyo, Sekretaris Desa, tanggal 22 November 2019, Pukul 08.30 WIB

<sup>79</sup> Wawancara dengan bapak Slamet Marjuki, tanggal 22 November 2019, pukul 09.00 WIB

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Heru, Ketua LPM, tanggal 23 November 2019, pukul 16.00 WIB

pembangunan. Namun tetap diadakan musyawarah terlebih dahulu setiap akan dimulai kegiatan. Pengurus lembaga kemasyarakatan desa harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pembangunan dan tujuan dilaksanakannya pembangunan.<sup>81</sup>

Hasil wawancara dengan Soni yang mengungkapkan bahwa:

Disini pembagian kerja dalam LKM sudah dibagi, sehingga kami bertugas sesuai dengan tugas masing-masing dalam membantu pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan. Namun tetap diadakan musyawarah terlebih dahulu setiap akan dimulai kegiatan. Pengurus lembaga kemasyarakatan desa harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pembangunan dan tujuan dilaksanakannya pembangunan.<sup>82</sup>

Hasil wawancara dengan Candra yang mengungkapkan bahwa:

LKM telah dibagi pembagian kinerja, sehingga kami tinggal bertugas sesuai dengan tugas masing-masing dalam membantu pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan. Namun tetap diadakan musyawarah terlebih dahulu setiap akan dimulai kegiatan. Pengurus lembaga kemasyarakatan desa harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pembangunan dan tujuan dilaksanakannya pembangunan.<sup>83</sup>

Data tersebut didukung oleh hasil observasi tanggal 22 November 2019 yang mana kepala desa mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh para perangkat desa, ketua LPM, ketua RT/RW, dan ketua Karang Taruna.<sup>84</sup>

- b. Melaksanakan pembangunan secara partisipatif di Desa kedungwaru

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Suyoto, Ketua RW, tanggal 23 November 2019, pukul 17.00 WIB

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Soni, Ketua RT, tanggal 23 November 2019, pukul 18.30 WIB

<sup>83</sup> Wawancara dengan Candra, Ketua Karang Taruna, tanggal 23 November 2019, pukul 19.00 WIB

<sup>84</sup> Observasi tanggal 22 November 2019, pukul 08.25 WIB

Melaksanakan pembangunan desa itu harus meliputi aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Mohammad Toha yang mengatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kedungwaru yang dilakukan oleh LPM , proyek yang akan dilaksanakan tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh tim pelaksana kegiatannya ataupun pemerintah desa setempat melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung.<sup>85</sup>

Data tersebut didukung oleh bapak Yudo Winulyo yang menyatakan bahwa:

Disini dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh LPM, , proyek yang akan dilaksanakan tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh tim pelaksana kegiatannya ataupun pemerintah desa setempat melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung.<sup>86</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Heru yang menyatakan bahwa:

Disini kami melaksanakan pembangunan desa dimana, proyek yang akan dilaksanakan tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh tim pelaksana kegiatannya ataupun pemerintah desa setempat melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan bapak Mohammad Toha, Kepala Desa, tanggal 25 November 2019, pukul 09.00 WIB

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan bapak Yudo Winulyo, Sekretaris Desa, tanggal 25 November 2019, pukul 09.30 WIB

masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung.<sup>87</sup>

Data tersebut didukung oleh hasil observasi pada 25 November 2019 yang mana kepala desa, sekretaris desa, dan ketua LPM membahas pelaksanaan pembangunan desa.<sup>88</sup>

Meskipun demikian halnya, namun dalam pelaksanaan proyek tersebut masih belum dapat terlepas dari adanya hambatan. Seperti yang didapatkan pada lokasi penelitian dimana *main set* masyarakat mengenai proyek pembangunan yang masih selalu berfikir bahwa setiap proyek pembangunan merupakan hal yang mendatangkan untung bagi tim pelaksananya. Sebagaimana hasil wawancara dengan tim pelaksana PNPM-MP yang mengatakan bahwa:

Hanya saja di PNPM-MP kendalanya adalah masyarakat kadang mengira bahwa pekerjaan seperti proyek yang biasanya, dalam artian bahwa mereka berpikir bahwa pengurus PNPM-MP pasti mendapat banyak untung, misalnya kalau ada sisa dana pasti kami yang akan mengambil sisa dana tersebut, padahal kan yang kami dapat hanyalah upah operasional saja.<sup>89</sup>

Data tersebut di dukung oleh observasi pada tanggal 27 November 2019 yang mana tim pelaksana PNPM-MP mengadakan rapat.<sup>90</sup>

---

WIB <sup>87</sup> Wawancara dengan bapak Heru, Ketua LPM, tanggal 25 November 2019, pukul 10.00

<sup>88</sup> Observasi tanggal 25 November 2019, pukul 08.30 WIB

WIB <sup>89</sup> Wawancara dengan tim pelaksana PNPM-MP, tanggal 27 November 2019, pukul 09.00

<sup>90</sup> Observasi tanggal 27 November 2019, pukul 08.00 WIB

Untuk proyek pembangunan yang diturunkan dari hasil Musrenbang yang kemudian pelaksanaannya dikerjakan oleh kontraktor memang partisipasi masyarakat tidak ada. Bahwa jika proyek dari hasil Musrenbang yang akan dijadikan sebagai unit analisis untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat. Sebagaimana berikut:

#### 1. Partisipasi pikiran

Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pekerjaan proyek PNPM-MP bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena, masyarakat selalu beranggapan bahwa proyek-proyek PNPM-MP merupakan proyek pemerintah yang pada dasarnya mempunyai anggaran cukup besar. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan itu harus mendapat upah. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Suroso yang mengatakan bahwa:

Ya memang, saya sendiri berpikiran bahwa proyek pembangunan pasti anggarannya besar, jadi kalau ikut serta dalam pekerjaan tersebut ya harus ada upah.<sup>91</sup>

Data tersebut didukung oleh bapak Agus juga yang mengatakan bahwa:

Kalau anggaran dana pasti besar, hanya saja saya masa bodoh dengan itu, tetapi kalau turun dalam pekerjaan ya harus mendapat upah.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan bapak Suroso, masyarakat, tanggal 26 November 2019, pukul 13.00 WIB

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan bapak Agus, masyarakat, tanggal 26 November 2019, pukul 13.30 WIB

Data tersebut di dukung oleh obsevasi tanggal 26 November 2019 dimana pertemuan peneliti dengan salah satu masyarakat.<sup>93</sup>

## 2. Partisipasi tenaga

Selain partisipasi dalam bentuk pikiran, partisipasi tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat desa yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan desa. Disini sedikit berbeda karena setiap masyarakat berbeda pikiran. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Pamuji yang mengatakan bahwa:

Kalau ikut partisipasi tenaga saya bisa turun dalam pekerjaan itu, tetapi tidak sepenuhnya hanya membantu.<sup>94</sup>

Data tersebut didukung oleh bapak Kasminto yang mengatakan bahwa:

Iya kalau saya ikut karena adanya tenaga, kalau uang atau lainnya tidak bisa mbak, tetapi tidak sepenuhnya sedikit membantu.<sup>95</sup>

## 3. Partisipasi keahlian

Dalam berpartisipasi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien serta berkualitas sangat ditentukan oleh tingkat keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh pekerjaanya. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Pamuji yang mengatakan bahwa:

---

<sup>93</sup> Observasi tanggal 26 November 2019, pukul 13.00 WIB

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan bapak Pamuji, masyarakat, tanggal 26 November 2019, pukul 14.00 WIB

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan bapak Kasminto, masyarakat, tanggal 26 November 2019, pukul 14.20 WIB



Masyarakat disini kan banyak yang bekerja sesuai keahlian masing-masing, kalau ikut serta dalam pekerjaan pembangunan tentu pekerja tukang yang lebih dibutuhkan.<sup>96</sup>

Data tersebut didukung oleh bapak Kasminto yang mengatakan bahwa:

Kalau saya kurang ahli dalam tukang mbak, tapi saya ya ikut serta tapi yang saya bisa.<sup>97</sup>

#### 4. Partisipasi barang

Untuk mempermudah pekerjaan dan apa yang dibutuhkan, partisipasi barang yang dimaksud adalah barang yang dimiliki warga dan diberikan secara sukarela. Barang yang dibutuhkan itu barang yang diperlukan dalam pembangunan. Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak Agus yang mengatakan bahwa:

Kalau untuk berpartisipasi barang ya apa yang kami punya tentunya yang sering digunakan dalam pembangunan biasanya kalau ada kayu, yang sering paku karena hanya mampu itu.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tidak sedikit masyarakat yang mau berpartisipasi dan sukarela mereka bekerja dengan baik. Kesiediaan para warga untuk bekerja sama dalam rangka mewujudkan tujuan bersama. Dengan keahlian yang dimiliki dapat dimanfaatkan dan diarahkan

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan bapak Pamuji, masyarakat, tanggal 26 November 2019, pukul 14.00 WIB

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan bapak Kasminto, masyarakat, tanggal 26 November 2019, pukul 14.20 WIB

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan bapak Agus, masyarakat, tanggal 26 November 2019, pukul 13.30 WIB

secara optimal dalam rangka pengerjaan proyek PNPM-MP dimasa yang akan datang.

- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa

Menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat berawal dari adanya berbagai keluhan masyarakat, kemudian keluhan tersebut dapat diadukan di lembaga kemasyarakatan, dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dibidang pembangunan. Secara umum LPM dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menyiapkan sarana seperti penyediaan:

1. Kotak saran

Dalam upaya mempermudah, menampung segala aspirasi, keluhan maupun saran dari masyarakat, pihak LPM menggunakan pola penyediaan kotak saran atau pengaduan. Dengan adanya kotak saran diharapkan masyarakat juga mau menyampaikan aspirasinya terhadap pelayanan dan pembangunan di Desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Heru yang menyatakan bahwa:

Agar masyarakat mau menyampaikan aspirasinya terhadap pelayanan dan pembangunan di Desa, kami membuat kotak saran yang sifatnya terbuka kepada masyarakat secara luas,

namun warga yang menyampaikan keluhan maupun saran kami rahasiakan identitasnya.<sup>99</sup>

Data tersebut di dukung oleh Marjiyanto yang menyatakan bahwa:

Iya memang LPM menyediakan kotak saran agar masyarakat mau menyampaikan aspirasinya terhadap pelayanan dan pembangunan di Desa. Kotak saran itu bersifat terbuka, namun warga yang menyampaikan keluhan maupun saran di rahasiakan identitasnya.<sup>100</sup>

Langkah ini merupakan bentuk komitmen Desa untuk menyukseskan program pembangunan di Desa.

## 2. Rapat

Salah satu bentuk menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh LPM dengan mengadakan rapat bersama setiap kepala dusun. Rapat adalah pertemuan atau berkumpulnya minimal 2 orang lebih untuk membahas apa yang dibutuhkan dan memutuskan suatu tujuan yang ingin dicapai.

Jadwal yang dilakukan oleh LPM untuk mengadakan rapat tidak jelas dan tidak menentu. Sehingga saran dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada kepala dusunnya masing-masing tidak jelas kapan akan disampaikan kepada ketua LPM. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Agus Wahyudiono yang mengatakan bahwa:

Tidak ada kepastian kapan jadwal rapat yang diumumkan oleh ketua LPM, sehingga saran dan keluhan dari

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Heru, tanggal 23 November 2019, pukul 16.00 WIB

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Marjiyanto, tanggal 23 November 2019, pukul 17.00 WIB

masyarakat hanya sekedar ditampung dan belum tersalurkan.<sup>101</sup>

Data tersebut didukung oleh bapak M. Khoiruddin Amri yang mengatakan bahwa:

Biasanya ketua LPM tidak jelas dalam mengadakan rapat. Namun, dalam tahun ini mengadakan rapat saat mendekati jadwal Musrenbang. Jadi dalam tahun ini LPM hanya mengadakan rapat satu kali dalam satu tahun.<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dusun Waru Jaya dan Kedung Indah terlihat bahwa LPM tidak efektif dalam menampung aspirasi masyarakat karena tidak ada kejelasan jadwal rapat yang dilaksanakan oleh LPM.<sup>103</sup>

Setelah melakukan rapat, kemudian pihak LPM berkoordinasi ke Desa tepatnya di Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat) yang kemudian akan dibahas lanjut pada rapat musrenbangdes.

Hal ini dijelaskan dalam wawancara bersama Bapak Heru yang mengatakan bahwa:

Dalam menampung aspirasi masyarakat kami mengadakan rapat yang diwakili setiap kepala dusun.<sup>104</sup>

Hal ini juga dipertegas oleh bapak Sumadi yang mengatakan bahwa:

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan bapak Agus Wahyudiono, Kepala Dusun Kedung Indah, tanggal 25 November 2019, pukul 10.00 WIB

<sup>102</sup> Wawancara dengan bapak M. Khoiruddin Amri, Kepala Dusun Waru Jaya, tanggal 25 November 2019, pukul 10.30 WIB

<sup>103</sup> Observasi tanggal 25 November 2019, pukul 10.00 WIB

<sup>104</sup> Wawancara dengan bapak Heru, tanggal 26 November 2019, pukul 17.00 WIB

Setelah saya mendapat pengaduan atau saran dari masyarakat mengenai masalah pembangunan yang ada di lingkungan, kemudian saya menyampaikan kepada ketua LPM saat rapat.<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat dalam menyampaikan keluhan yang dialami mengenai masalah pembangunan di desa Kedungwaru, mereka mengadukan ke kepala lingkungannya masing-masing. Setelah adanya saran dan pengaduan dari masyarakat, kepala lingkungan membawa hasil pengaduan dalam rapat yang dilakukan oleh LPM Kemudian hasil dari rapat yang dilakukan oleh LPM bersama setiap kepala lingkungan, ketua LPM. Berkoordinasi ke kantor desa yang dikoordinasikan kepada Kaur Kesra dan kemudian akan di bahas lanjut pada rapat musrenbang.<sup>106</sup>

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting bagi LPM dalam mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.

Untuk mengetahui fungsi LPM di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, ada beberapa fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sebagai fasilitator dan

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan bapak Sumadi, Kepala Dusun Kedung Taman, tanggal 26 November 2019, pukul 18.30 WIB

<sup>106</sup> Observasi tanggal 26 November 2019, pukul 17.00 WIB

dinamisator bagi pembangunan wilayah desa. Berikut fungsi LPM di Desa Kedungwaru:

1. Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai fasilitator

LPM sebagai fasilitator di desa adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Agar dapat menjadi fasilitator yang baik ada beberapa hal yang dapat dilihat yaitu:

a. Masyarakat ikut merencanakan pembangunan

Masyarakat boleh ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan desa mereka dan juga harus bertanggungjawab dengan program yang telah mereka usulkan dalam musrenbang tingkat Desa dan seterusnya.

Hal senada disampaikan oleh kepala Dusun Kedung Indah:

Dalam merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa ini memang masyarakat diikutsertakan dalam mengusulkan pembangunan yang menjadi prioritas di lingkungan masing-masing.<sup>107</sup>

Hal ini juga dipertegas oleh kepala Dusun Waru Jaya yang mengatakan bahwa:

Masyarakat diikutsertakan dalam usulan pembangunan dan mereka juga harus bertanggung jawab atas pembangunan yang telah mereka usulkan di Desa.<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan selaku kepala Dusun Kedung Indah dan kepala

<sup>107</sup> Wawancara dengan kepala dusun kedung indah, tanggal 29 November 2019, pukul 09.00 WIB

<sup>108</sup> Wawancara dengan kepala dusun waru jaya, tanggal 29 November 2019, pukul 10.00 WIB

lingkungan Waru Jaya mengatakan bahwa masyarakat yang aktif seperti yang dikatakan kepala Dusun di dalam merencanakan pembangunan akan mempercepat kemajuan pembangunan yang akan dilaksanakan karena mereka tidak perlu lagi di perintah terlebih dahulu demi kemajuan pembangunan di desa Kedungwaru.<sup>109</sup>

Masyarakat yang aktif di Desa Kedungwaru ternyata tidak semua yang memiliki keaktifan yang sama karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang lain yang menyatakan bahwa:

Iya saya tahu kalau ada musrenbang di Desa, tapi saya tidak ikut dalam rapat itu karena saya ikut saja dengan apa keputusan dari pihak Desa.<sup>110</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan selaku masyarakat di Desa Kedungwaru bahwa masyarakat di Desa Kedungwaru kurang peduli terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan karena mereka hanya mengikuti apa hasil keputusan musrenbang tanpa ikut serta dalam musrenbang desa tersebut. Terkait dengan pernyataan dari masyarakat seperti di atas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat di desa Kedungwaru masih kurang kesadarannya dari masing-masing individu, apalagi

---

<sup>109</sup> Observasi tanggal 29 November 2019, pukul 09.00 WIB

<sup>110</sup> Wawancara dengan bapak Yani, tanggal 30 November 2019, pukul 10.00 WIB

dengan zaman sekarang gotong royong dan kebersamaan sudah sangat berkurang, karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing.

Hal ini berdasarkan wawancara bersama bapak Lukman Hadi yang mengatakan bahwa:

Wajar kalau partisipasi masyarakat disini kurang karena menurut saya setiap orang memiliki kepentingan masing-masing. Seperti sibuk mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>111</sup>

Temuan penelitian ini menggunakan data wawancara yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik wawancara dengan beberapa narasumber.

b. Masyarakat ikut dalam merencanakan prioritas usulan program

Prioritas usulan yang ingin dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga mendesak dilaksanakan ditingkat desa. Untuk memperoleh informasi yang jelas maka hal mengenai prioritas penyelenggaraan program pemerintah yang akan dilaksanakan di desa Kedungwaru maka hal ini dijelaskan dalam wawancara bersama bapak Suyoto bahwa:

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan bapak Lukman Hadi, tanggal 30 November 2019, pukul 11.00 WIB



Yang saya lakukan dalam penyelenggaraan prioritas program pembangunan hanya untuk kepentingan masyarakat disini.<sup>112</sup>

Selanjutnya wawancara dengan pak kepala desa yang menyatakan bahwa:

Penentuan prioritas dapat dilihat dulu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang diprioritaskan untuk kepentingan bersama dan kemudian melihat apa-apa saja yang sudah diprogramkan oleh pemerintah setelah itu kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Kedungwaru. Kemudian program prioritas dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memang dilakukan setahun sekali dalam rapat musrenbang ditingkat desa.<sup>113</sup>

## 2. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa sebagai dinamisor

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, LPM harus teliti dan bijaksana dalam memantau kegiatan pembangunan dengan cara menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif di masing-masing lingkungan. LPM melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan Program Pembangunan. Maka agar mengetahui sejauh mana LPM melaksanakan fungsinya maka dapat dilihat dari informasi yang disampaikan oleh bapak Suyoto bahwa:

LPM desa Kedungwaru disini tidak melakukan pemantauan secara bertahap, mereka hanya mengecek disaat awal berjalannya program pembangunan dan setelah selesainya pelaksanaanya program pembangunan tersebut. Setelah

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan bapak Suyoto, tanggal 30 November 2019, pukul 11.30 WIB

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Mohammad Toha, tanggal 2 Desember 2019, pukul 08.30

selesai proses semua itu sama sekali tidak ada. Maka perannya tidak berjalan maksimal.<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa tugas LPM tidak dilaksanakan secara maksimal. Dari informasi di atas maka selanjutnya dilakukan wawancara dengan ketua RW yang dimana dalam pelaksanaan pemantauan pembangunan apakah benar tidak dilakukan secara maksimal, maka dikemukakan oleh bapak Adi Sutoyo bahwa:

Pembangunan fisik yang telah dibangun yah berjalan dengan semestinya. Sebagai ketua RW 01 saya belum pernah melihat anggota ataupun ketua LPM melakukan pemantauan secara langsung jika pembangunan tersebut sudah selesai.<sup>115</sup>

Dalam melakukan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dialihkan kepihak ketigakan yaitu kontraktor yang seharusnya sudah menjadi kewenangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini disebabkan adanya kepentingan politik yang mendominasi pekerjaan di desa Kedungwaru.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Heru yang mengatakan bahwa :

bagaimana lembaga kami bisa berperan dengan semestinya jika program pembangunan yang semestinya dikerjakan

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan bapak Suyoto, tanggal 3 Desember 2019, pukul 09.30 WIB

<sup>115</sup> Wawancara dengan bapak Adi Sutoyo, Ketua RW 01, tanggal 3 Desember 2019, pukul 15.00 WIB

oleh pihak kami namun pada kenyataannya dialihkan ke pihak ketiga yaitu kontraktor.<sup>116</sup>

Temuan penelitian ini menggunakan data wawancara yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik wawancara dengan beberapa narasumber.

## **B. Temuan Penelitian**

Fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif yang ada di Desa Kedungwaru terdiri dari berbagai macam lembaga formal khususnya, yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Lembaga Kemasyarakatan berada dalam setiap masyarakat mempunyai taraf kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pokok apabila dikelompokkan merupakan himpunan pokok dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip kesukarelaan, kemandirian, dan keragaman. Sedangkan karakteristik dari Lembaga Kemasyarakatan berbasis kewilayahan, keagamaan, profesi, kebudayaan yang termasuk di dalamnya adat istiadat, kepemudaan, gender, dan interest grub/kepentingan.

Hasil identifikasi terdapat 5 lembaga, lembaga sosial kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada di Desa Kedungwaru lembaga tersebut meliputi LPMD, PKK, RT, RW, Karang Taruna.

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan bapak Heru, tanggal 3 Desember 2019, pukul 16.00 WIB

Hasil pemetaan lembaga yang dilakukan pada waktu proses pengkajian potensi dan masalah menunjukkan lembaga kemasyarakatan yang eksis dan memiliki pengaruh langsung dalam menggerakkan masyarakat adalah LPMD, RT, RW, PKK, dan Karang Taruna. Dalam pelaksanaannya, LPMD yang mewadahi pelaksanaan pembangunan di Desa dari usulan RT/RW serta berwenang mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut. Fungsi lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dilaksanakan dengan:

a. Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif

Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melalui musyawarah setiap akan memulai kegiatan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pembangunan dan tujuan dilaksanakannya pembangunan. Dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif setiap lembaga kemasyarakatan di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

b. Melaksanakan pembangunan secara partisipatif di Desa kedungwaru

Melaksanakan pembangunan desa itu harus meliputi aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus

langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam hal melaksanakan pembangunan secara partisipatif ada beberapa hal mengenai partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. Partisipasi Pikiran

Dimana partisipasi pikiran masyarakat berpikiran bahwa dana untuk pembangunan cukup besar dan yang ikut serta dalam pembangunan harus mendapatkan upah.

2. Partisipasi Tenaga

Masyarakat mampu memberikan tenaga mereka dalam berpartisipasi

3. Partisipasi Keahlian

Dalam pembangunan diperlukan adanya keahlian, disini masyarakat berpartisipasi yang bekerja sebagai kuli bangunan sangat diperlukan.

4. Partisipasi Barang

Sebagai masyarakat yang awam, dalam berpartisipasi barang mayoritas menyumbangkan paku karena yang paling digunakan, misalkan ada kayu itu sudah lumayan.

- c. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Kedungwaru

Menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat berawal dari adanya berbagai keluhan masyarakat, kemudian keluhan tersebut

dapat diadakan di lembaga kemasyarakatan, dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dibidang pembangunan.

Dalam hal ini hubungan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan masyarakat sangat kurang dikarenakan kurangnya komunikasi. Sehingga masyarakat tidak ingin ikut campur / masa bodoh dalam hal pembangunan.

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting bagi LPM dalam mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menurut keterlibatan masyarakat yang akan memperbaiki mutu hidupnya.